

STATECRAFT KETIGA BAGI POST KONFLIK ISRAEL-PALESTINA 2023

Faidatul Janah

Pascasarjana Konsentrasi Kajian Timur Tengah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
faidatuljanah2@gmail.com

Munawar Ahmad

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Munawar.ahmad@uin-suka.ac.id

Submitted: August 30th 2024 | Accepted: July 27th 2025

ABSTRAK

Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan menjadi isu global yang tengah memanas di akhir tahun 2023 ini. Serangan Hamas kepada Israel pada 7 Oktober lalu telah meluluhlantahkan Palestina kembali. Pada penelitian ini, Penulis menganalisis konflik yang telah terjadi menggunakan teori Postmodernism yang berorientasi pada pengetahuan di balik serangan yang dilakukan oleh Hamas. Demikian, genealogi sejarah sebagai perspektif yang digunakan dalam penelitian ini guna mengetahui alur sejarah masa lalu hingga masa kini. Metode yang digunakan berupa Studi Pustaka (*Library Research*) dengan jenis penelitiannya berupa kualitatif yaitu dengan mengutip literatur dari buku, jurnal, artikel, dan wacana isu konflik dari berita Internasional. Hasil penelitiannya yaitu : 1) Pengetahuan berupa fenomena di balik serangan Hamas kepada Israel yaitu tidak terlepasnya dukungan dari Iran kepada Hamas atas kebebasan Palestina. Hal ini serangan terjadi sebagai “reaksi” atas perlakuan Israel dalam menjajah Palestina. Adapun yang menjadi sebab kekerasan yang dilakukan Hamas adalah mengenai Ideologi dan history demografi. 2) Statecraft kedua fase mengalami kegagalan, maka penulis menawarkan sebagai upaya mencapai perdamaian dengan reunifikasi dua negara yang berlandaskan hukum internasional yaitu dengan memberlakukan “*One Country Two System*” di modern ini sebagai statecraft fase ketiga yaitu menjadi Republik Israel.

Keywords: *Konflik Israel-Palestina, One Country Two System, Statecraft Ketiga.*

ABSTRACT

The prolonged Israeli-Palestinian conflict has become a global issue that is heating up at the end of 2023. Hamas' attack on Israel on October 7 has devastated Palestine again. In this research, the author analyzes the conflict that has occurred using Postmodernism theory which is oriented towards the knowledge behind the attacks carried out by Hamas. Thus, genealogy of history as a perspective used in this research to find out the flow of history from the past to the present. The method used is Library Research with the type of research being qualitative, namely by citing literature from books, journals, articles, and discourse on conflict issues from international news. The results of his research are: 1) The knowledge behind Hamas' attack on Israel is the unbreakable support from Iran to Hamas for Palestinian

freedom. This attack occurred as a "reaction" to Israel's treatment in colonizing Palestine. The causes of violence committed by Hamas are ideology and history demographics. 2) The second phase of statecraft has failed, so the author offers as an effort to achieve peace with the reunification of two countries based on international law, namely by enforcing the "One Country Two System" in modern times as the third phase of statecraft, namely becoming the Republic of Israel.

Keywords: Israel-Palestine Conflict, One Country Two System, The 3rd Statecraft

PENDAHULUAN

Secara geopolitiknya, kawasan Timur Tengah memiliki peran penting dalam hubungan internasional dan stabilitas politik Internasional. Dengan Kawasan strategis yang terletak di tiga benua Asia, Afrika, dan Eropa menjadikan Kawasan ini menjadi market kepentingan oleh aktor-aktor di dalamnya terutama dalam aspek ekonomi dan perdagangan minyak buminya. Oleh karenanya, kawasan Timur Tengah menjadi kawasan konflik global, di mana konflik yang terjadi dalam wilayah regional telah melibatkan negara-negara superpower dalam menjalankan aktivitas politik dan stabilitas sosialnya. Kompleksitas konflik yang terjadi di Timur tengah tak lain juga disebabkan oleh dinamika sosial dan ideologi keagamaan. Hingga saat ini, konflik berkepanjangan yang tidak kunjung usai yaitu konflik Israel – Palestina. Berawal dari problematika ideologi keagamaan di mana bergejolak perlawanan antara Muslim dan Yahudi yang sama-sama ingin menguasai tempat yang mereka anggap suci yaitu Yerusalem. Dengan konflik berkepanjangan ini membuat Timur Tengah selalu memanas dalam permasalahan agama, sektarian, dominasi politik hingga ekonomi perdagangan (Indriana, 2017).

Munculnya negara Yahudi yang memiliki *power* dalam sejarahnya mendorong tatanan politik sebagai negara maupun agama menjadi kekuatan tersendiri baginya. Yahudi sebagai bangsa memiliki kedaulatan setelah sejarah panjangnya dalam membangun negara yang eksistensi. Dengan adanya kedaulatan negara Israel dibawah naungan sekutu AS, para gerakan muslim maupun partai semakin moderat terhadap Israel dan hal ini semakin gencarnya Israel dalam merebut tanah air Palestina. Kekhawatiran sebagai umat Muslim dalam mempertahankan tanah Palestina muncul di kalangan para anti-Barat, maka terbentuklah gerakan yang membela Islam yaitu Hamas (*Harakah Al- Muqawwamah Al-Islamiyyah*) di mana gerakan ini berawal dari gerakan sosial kemudian menjadi gerakan politik atas perjuangan "jihadis" nya. Berawal dari sini, banyaknya empati para dunia Muslim terhadap kaum muda Palestina yang memperjuangkan Gaza dan Tepi Barat itu (Sihbudi, 2007).

Konflik Israel Palestina yang telah berlangsung dalam beberapa tahun dengan rentang waktu yang sangat panjang terus membuat Timur Tengah seakan membara. Proses perdamaian dengan segala cara juga mengalami kegagalan. Sejak diselenggarakannya perjanjian Oslo pada tahun 1993 upaya perdamaian yang dicapai dalam waktu lima tahun ke depan yaitu dengan berdirinya dua negara dengan ketentuan-ketentuan yang telah disponsori oleh AS dan telah disetujui oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Perdana Menteri Palestina Yasser Arafat (pada masa itu) telah menghasilkan polemik yang sama saja tidak membawa hasil perdamaian (Bishara, 2023). *Two State Solution* yang digunakan sebagai upaya perdamaian

menjadi perdebatan konflik yang semakin memanas di mana antara kekerasan dan kegigihan sama-sama dilakukan dalam mempertahankan hak tanah dan kekuasaan.

Pada 7 Oktober 2023, Hamas telah menyerang kembali Israel hingga menewaskan kurang lebih 1.405 korban jiwa termasuk 308 tentara Israel dan 58 petugas polisi. Atas aksi serangan Hamas, Israel tidak tinggal diam untuk melancarkan aksi pembalasan atas Hamas. Puluhan jet tempur Israel menyerang sejumlah target milik Hamas. Pada Minggu, 8 Oktober 2023 pesawat-pesawat tempur Israel menggempur Lokasi di Gaza yang kemudian disebut dengan *“Iron Swords”*. Komandan senior Hamas, Mohammed Deif mengatakan serangan ini menandai dimulainya *“Operation Al-Aqsa Flood”* (Aljazeera, 2023, n.d.). Serangan senjata terus diluncurkan oleh tentara Israel hingga pasukan darat Israel memperluas operasinya. Pasca serangan balasan Israel, wilayah Palestina berada dalam kegelapan karena pemadaman komunikasi di jalur Gaza dan lebih dari 7.326 warga Palestina termasuk anak-anak, perempuan hingga lanjut usia menjadi korban (Stepansky & Najjar, 2023).

Hamas merupakan gerakan militer dari Palestina dengan perjuangannya melawan tentara Israel mendapatkan dukungan dari Iran (BBC News, 2023). Serangan Hamas terhadap Israel tidak lahir dari ruang kosong melainkan adanya *knowledge* (pengetahuan) dibalik keberanian serangan yang diluncurkan. Kekuatan suatu negara dalam upaya menjaga kedaulatan baik berupa perdamaian global maupun regional, ekonomi, hingga pertahanan akan signifikan di masa modern ini.

Tulisan ini berangkat dari adanya konflik kedua negara yang mengalami konflik berkepanjangan. Dalam artikel ini berupaya menawarkan alternatif berupa membangun negara dengan seni mengingat kedua fase yang sudah dilakukan juga tidak membawa hasil dalam mencapai perdamaian. Jalan alternatif ini muncul dari kegagalan dua sistem yaitu fase di bawah pretektorat Inggris kemudian fase Two State Solution dalam mencapai perdamaian dua negara. Oleh karenanya, teori postmodernisme layak digunakan sebagai pisau analisa dalam menawarkan alternatif terbaru bagi post konflik Israel-Palestina yaitu fase ketiga berupa *“one state two system”*.

KERANGKA TEORI

Pada era sekitar tahun 1987 dan 1988 telah membuka era metodologi dalam studi HI melalui perspektif postmodern. Teori postmodern muncul tidak dari ruang kosong melainkan adanya sejumlah problematika dan strategi teoritis yang berbeda-beda yang dapat digabungkan dengan mudah di bawah postmodernisme. Teori postmodern mempunyai empat bagian utama yaitu : relasi antara kekuasaan (*power*) dan ilmu (*knowledge*), strategi textual, negara berdaulat, dan etis postmodernism. *Power* memiliki relasi yang saling mendukung atas produksinya sebuah proses pengetahuan. Hal ini, *power* yang kaitannya dengan “kekuasaan politik” telah dijadikannya konsep dasar negara. Ini pula ketika membicarakan akan kekuasaan maka tidak dapat dielakkan dengan ilmu pengetahuan yang menjadikan aspek fundamental dalam teori HI. Der Derian mengatakan dalam karyanya yang berjudul *“On Diplomacy”* yang terbit pada tahun 1988 bahwa Hubungan Internasional melewati sebuah penelitian epistemologis yang mempertanyakan setiap bahasa, ide, strategi, dan sejarah yang membentuk dan berdampak pada tradisi pemikiran (Burchill & Linklater, 2019).

Kaum postmodernis mengharapkan adanya hubungan personal antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan dalam analisis HI. Mengikuti pendapat Michel Foucault dalam tulisannya yang berjudul *The History of Sexuality*, ilmu pengetahuan adalah siklus politik yang memiliki hubungan yang kuat dengan kekuasaan. Hal ini berlaku dalam HI, namun dalam semua bagian kehidupan politik di mana kekuasaan bekerja. Ini bukanlah aksentuasi pragmatis pada premis material dari kekuatan, namun lebih pada penekanan pada bagaimana para aktor dan komentator, (misalnya, setelah serangan 11 September 2001 di World Trade Center dan Pentagon) mencoba untuk memaksakan pemahaman yang pasti pada kesempatan tertentu. Kebenaran secara konsekuensi diatur oleh bahasa, dan peningkatan pembicaraan etimologis menghasilkan desain atau kerangka kerja yang terdiri dari informasi, subjek, dan objek. Sebagai contoh, peningkatan gagasan tentang pengaruh dan istilah-istilah serta kecurigaan yang terkait negara, anarki/kekerasan, territorial, keamanan, dan cara hidup manusia dalam kapasitas tersebut (Viotti & Kauppi, 2012, p. 334).

Teori Postmodernis mengasumsikan bahwa analisis Sejarah tidak hanya melalui tekstual saja melainkan interpretasi melalui tindakan yang “realita”. Postmodernism menjadikan pembentukan realitas sosial dan politik melalui konsep ide-ide, ilmu pengetahuan, representasi dan ideologi. Foucault menyatakan dalam karyanya tentang Kesehatan mental (*Sanity*), Seksualitas (*Sexuality*), dan Hukuman (*Punishment*) bahwa eksplorasinya tentang konsep-konsep yang digunakan secara umum merupakan suatu yang dikembangkan atau dibangun secara sosial yang seiring waktu dapat diterima atau sebaliknya ditantang dalam hubungan antar manusia. Menurutnya, kebenaran adalah sesuatu yang penting di dunia ini dan kebenaran itu menimbulkan pengaruh tetap atas kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan menghasilkan ilmu pengetahuan dan mengakui bahwa kekuasaan dan ilmu pengetahuan secara langsung menunjukkan satu sama lain, bahwa tidak ada hubungan kekuasaan tanpa perkembangan yang sesuai dari bidang ilmunya. Dengan cara yang sama, tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak melibatkan dan terdiri dari hubungan kekuasaan (Viotti & Kauppi, 2012, p. 335)

Pada teori Postmodernisme metodologi paradigmanya berkaitan dengan genealogi dan dekonstruksi dimana sejarah masa lalu mempunyai sebab akibat hingga memunculkan perspektif sekarang di masa modern. Teori postmodernis juga mengambil perspektif di bidang politik yang mana berkaitan dengan modernisasi di arus global pada era sekarang. Ini juga telah membentuk sebuah kedaulatan negara yang direpresentasikan menjadi sebuah identitas belaka. Hal ini menurut Foucault atas permasalahan kontemporer merupakan sebuah kemiripan kesalahan yang muncul di masa lain. Menurutnya, tidak ada kebenaran yang ada hanyalah perspektif “kebenaran” dalam memahami ilmu pengetahuan. Masa kini tidak bersatu dengan dirinya sendiri atau jika tidak dengan gambaran dirinya sendiri, dan upaya para cendekiawan postmodernis adalah membuat aksentuasi pada hal-hal yang memberikan kesempatan untuk mengubah masa kini. Oleh karenanya, Postmodernisme cenderung pada bagaimana sebuah perspective menghasilkan representasi yang mencapai keaslian yang dominan dan monopoli dengan mem marginalisasi yang lain (Burchill & Linklater, 2019, p. 249).

Geneologi Israel-Palestina

Sejarah tanah Palestina telah lama dikuasai oleh Turki Ustmani sejak wilayah ini dan Timur Tengah berada di bawah kekuasannya kurang lebih tiga abad lamanya. Kemudian pada tahun 1917 Palestina berpindah kekuasaan dari Turki Ustmani ke imperialisme Inggris dikarenakan kekalahannya dalam perang. Pada tahun yang sama, atas kekalahan ini pun digunakan oleh kaum Yahudi yang ingin mendirikan *National Home* nya di tanah Palestina telah diresmikan dalam Deklarasi Balfour di Inggris pada 2 November 1917. Deklarasi Balfour merupakan bentuk perjanjian dari Inggris kepada kaum Yahudi agar dapat mendirikan tanah air di Palestina (Nurjannah & Fakhruddin, 2019). Tidak lama dari berpindahnya Palestina dari Arab-Islam mereka harus berpindah kepada orang Yahudi dimana mereka akhirnya mendirikan negara Israel dan mendeklarasikannya sebagai suatu negara yang Merdeka pada tanggal 14 Mei 1948.

Sejak berdirinya negara, mereka telah menjalankan sistem politik yang modern seperti mendirikan beberapa organisasi dalam pemerintahan, partai politik, birokrasi, dan asosiasi professional. Sedangkan negara sekeliling mereka masih menggunakan sistem kabilah, klan, desa, dan komunitas-komunitas tertentu. Secara geografisnya pun mereka yang dikelilingi oleh mayoritas Muslim di negara-negara tetangga namun masyarakat Israel cenderung bergaya Barat ditengah kebudayaan Timur Tengah. Usahanya dalam mendirikan kedaulatan negaranya tidak lain juga menyebarluaskan kebudayaan Yahudi di seluruh dunia. Doktrin-doktrin yang meluas sebagai asas negara guna melegitimasi berdirinya negara Yahudi dengan penganut Yudaisme (Sihbudi, 1995).

Setelah adanya negara Israel yang menunjukkan eksistensi dan *power*-nya menjadikan konflik negara Kawasan lainnya seperti Mesir, Yordania, Suriah, Beirut, Arab Saudi, dan Irak terlibat dalam peperangan karena membela Palestina namun peperangan ini banyak yang gugur dan mengalami kekalahan. Perang yang meletus pada tanggal 5-10 Juni 1967 disebut *Six day war* (Perang enam hari) telah mencetak sejarah perang antara Arab-Israel tidak hanya Palestina Israel. Karena kekalahan bangsa Arab atas kaum Yahudi tersebut bangsa Arab telah kehilangan beberapa wilayah kawasannya karena telah direbut Israel.

Dalam sejarahnya, Yahudi yang ingin menguasai ekonomi hingga menyebarluaskan agama Yahudi di seluruh dunia telah menghalalkan segara cara demi terwujudnya kekayaan dan geopolitik negaranya pada zaman modern ini. Meski dari zaman klasik, negara yang di huni kaum Yahudi tersebut bisa dibilang sudah modern meski dikalangan wilayah sekitarnya masih primitive atau konservatif karena keterpengaruhannya terhadap negara Barat yang menjadikan Israel sebagai negara yang memiliki superpower dalam segala aspek. Namun tidak kalah dengan Palestina yang mempunyai gerakan persatuan dalam membela perjuangan Al-Aqsa, para pejuang jihadis tidak gentar dalam menghadapi kuatnya pertahanan Israel.

Negara Israel didominasi oleh kelompok Yahudi tentu tidak terlepas dari peran Herzl, seorang Yahudi terkemuka yang membentuk militerisme Zionis. Herzl membentuk Zionisme sebagai Gerakan politik dan nasional namun menentang semua orang untuk merumuskan Yudaisme sebagai sebuah agama. Dengan mempolitisir zionisme mendorong Yahudi di seluruh dunia ikut tergerak dan berbondong menuju Palestina dan pada akhirnya berdirilah sebuah negara Yahudi di tanah air Palestina.

Namun ketika Herzl menyerukan dalam menantang Yudaisme, para pendeta Yudaisme tidak setuju dengan adanya negara Yahudi di Palestina. Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, akan mengakibatkan pertikaian dengan penduduk asli yang telah lama tinggal di sana. Kedua, kecurigaan akan terus ada dari zionisme terhadap orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Mereka akan dituduh mempunyai kesetiaan ganda dan kewarganegaraan yang tidak hanya satu (Sihbudi, 1995, p. 104).

Sebelum disahkannya Zionisme sebagai sebuah Gerakan militerisme, secara sejarah ideologis maupun politis zionis sudah mengakar pada gerakan-gerakan keagamaan Yahudi yang sudah ada sejak dahulu. Zionisme dipimpin oleh seorang Jurnalis Yahudi terkenal dalam mencapai kesuksesan sebagai kolumnis dalam berbagai permasalahan politik dan sosial. Pada tahun 1894, kebangkitan baru antisemitisme Eropa Barat mengakibatkan kerentanan Yahudi yang kemudian Herzl meluncurkan drama pendek *“The New Ghetto”*. Hingga pada musim semi tahun 1895, Herzl memunculkan gagasan zionis dan mengilhami wawancaranya dengan Moritz de Hirsch bulan Juni yang merupakan seorang tokoh legendaris Yahudi dan pengusaha kapitalis (M. Sachar, 2006).

Usaha Herzl dalam menghindari antisemitisme di Eropa diwujudkan dalam karyanya yang berjudul *“Der Judenstaat”* atau Negara Yahudi diterbitkan pada tahun 1896 yang berisi tentang pendirian negara Yahudi. Judul samping dari bukunya bertuliskan *“An Attempt at a Modern Solution to the Jewish Question”*, yang mana hal tersebut didasari atas pertanyaan yang sering muncul bukan terkait persoalan sosial ataupun agama tetapi terkait dunia politik. Kebencian terhadap Yahudi adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan dan merupakan masalah nasional yang harus diubah dengan jawaban dari orang-orang dewan. Proses pendirian negara Yahudi memakan waktu panjang dengan peristiwa penolakan dan pengusiran Yahudi dari Eropa. Selain itu, penolakan Yahudi di tanah Mesir juga terjadi yang pada akhirnya mereka eksodus dari tanah mereka sendiri (M. Sachar, 2006).

Selanjutnya, Herzl telah berinisiatif menggunakan metode *“gradual infiltration”* untuk pemukiman Yahudi di tanah Argentina atau Palestina. Instrumen ini dibuat dengan tujuan menciptakan *“Masyarakat Yahudi”* atau *“Perkumpulan Orang Yahudi sebagai perwakilan hukum dari ide nasional dan sebuah perusahaan saham Yahudi untuk membiayai emigrasi Yahudi maupun Pembangunan secara fisik negara Yahudi*. Kini, negara Yahudi tersebut menempati sebagian wilayah Palestina. Penduduk Israel banyak dari imigran yaitu Yahudi dari Amerika dan Sebagian dari Eropa yang semakin signifikan. Bahkan dari mereka banyak yang menjadi pekerja publik diantaranya di *the Jewish Agency* (Badan Yahudi), *the Jewish National Fund* (Dana Nasional Yahudi), *the United Jewish Appeal and Israel Bonds offices* hingga menjadi Walikota dan Perdana Menteri (M. Sachar, 2006, p. 907).

Kekuatan militer Israel dalam menghadapi Palestina maupun bangsa Arab merupakan akar kolaborasi dari pemerintah AS. Dikarenakan hal ini, para penduduk Israel banyak dari imigran yaitu Yahudi dari Amerika dan sebagian dari Eropa. Setelah tahun merdekaanya negara Israel, pertumbuhan Yahudi Amerika dan Kanada semakin signifikan. Bahkan dari mereka banyak yang menjadi pekerja publik diantaranya di *the Jewish Agency* (Badan Yahudi), *the Jewish National Fund* (Dana Nasional Yahudi), *the United Jewish Appeal and Israel Bonds offices* hingga menjadi Walikota dan Perdana Menteri (M. Sachar, 2006, p. 907). Maka demikian dapat dipastikan akar pemikiran

dan ideologi bangsa Yahudi Israel juga dari kelompok Barat terutama AS. Dari Israel berbentuk negara klasik hingga modern, tujuan dan pemikiran Israel seiring mengalami perubahan dimana Yahudi yang awalnya ingin menyebarkan paham agamanya terhadap umat di dunia, kini semakin ingin menguasai ekonomi dunia dan melakukan aneksasi atas wilayah Palestina.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model penelitian studi Pustaka (*library research*). Sumber Data Primer berupa wacana isu konflik Palestina Israel yang peneliti dapat dari media publikasi seperti berita pada SindoNews Internasional, Al-Jazeera, dan Al-Arabiyya.net beserta jurnal publikasi tentang konflik Palestina-Israel. Sedangkan data sekunder berupa buku teori yang berjudul Teori-teori Hubungan Internasional oleh Scott Burchill dan Andrew Linklater edisi terjemah, buku International Relations Theory oleh Paul R. Viotti edisi ke lima beserta jurnal tentang analisis teori *“One Country Two System”* atau *“One Country Two Nasionalities”* yang berjudul *“One Country, Two Systems: A Theoretical Analysis”*. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori Postmodern perspektif genealogi yang akan membentuk tatanan baru suatu negara. Proses reunifikasi dua negara tersebut penulis adopsi melalui cara hukum internasional reunifikasi negara Republik Rakyat Cina sehingga membentuk negara *“One Country Two System”*. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menguraikan tentang pengetahuan yang ada di balik peristiwa konflik Israel-Palestina di tahun 2023 dan upaya pembentukan *“One Country Two System”* sebagai perwujudan perdamaian antara dua negara di fase ketiga setelah fase negara Israel di bawah protektorat Inggris kemudian Solusi dua negara (*Two State Solution*).

HASIL PEMBAHASAN

a. Statecraft Fase Pertama Protektorat Inggris

Bangsa Yahudi yang mengalami penindasan di Eropa telah menumbuhkan semangat persatuan bagi seluruh Yahudi yang ada di dunia. Dengan mendirikan gerakan Zionisme pada tahun 1897 oleh Theodore Herzl diharapkan dapat membentuk negara Yahudi yang masih tercerai-berai secara geografisnya. Kongres pertama yang dilaksanakan pada tahun 1906 berencana untuk mendirikan sebuah negara bagi kaum Yahudi di tanah Palestina. Hal ini pula dipengaruhi oleh terjadinya krisis sosial-ekonomi di Eropa karena meletusnya Perang Dunia I pada tahun 1914-1918. Krisis yang bergejolak di Eropa telah memberikan jalan bagi Zionisme untuk menguasai tanah Palestina yang pada waktu itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani (Kumoro, 2009, p. 21).

Perang Dunia I yang terjadi perseteruan antara Inggris dengan Jerman telah memberikan pengaruh bagi bangsa nasionalisme Arab. Inggris telah mendorong nasionalisme Arab guna melawan hegemoni Turki Utsmani yang telah memihak Jerman pada Perang Dunia I. Namun, satu sisi, Inggris menginginkan tanah Palestina untuk diduduki bangsa Yahudi yang telah ia janjikan kepada gerakan Zionisme. Demikian, ini menjadi konspirasi yang menyatakan bahwa berdirinya negara Israel mendatang. Sebagai mendukung berdirinya negara Yahudi, ada dua peristiwa penting yaitu perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916 oleh Inggris dan Prancis yang

menginginkan peninggalan Turki Utsmani di wilayah Arab. Pada perjanjian ini disebutkan bahwa Inggris mendapatkan wilayah jajahan Irak dan Yordania sedangkan Prancis mendapatkan wilayah jajahan Suriah dan Lebanon, kemudian Palestina menjadi tanah yang dimana wilayahnya berstatus internasional. Kemudian tahun berikutnya yaitu 1917, Peristiwa penting kedua yaitu Deklarasi Balfour yang menyatakan Mandat Inggris untuk Palestina dimana wilayahnya akan dibangun negara untuk bangsa Yahudi (Kumoro, 2009, p. 22).

Deklarasi Balfour yang dinyatakan oleh pemerintah Inggris kepada pemimpin komunitas Yahudi, Walter Rothschild yang pada waktu itu masih berada di Inggris. Kemudian, penduduk Palestina merasa tidak terima karena tanah wilayahnya bekas peninggalan kekaisaran Ottoman telah diambil paksa oleh Inggris. Dokumen penting sebelum deklarasi Balfour telah disahkan oleh utusan diplomat Inggris, Mark Sykes dan Diplomat Perancis François Georges-Picot. Dokumen ini telah mengindikasikan bahwa Ottoman kalah dan tanah wilayah Palestina akan dibagi untuk calon pemenang. Hingga kemudian peristiwa tersebut dengan perjanjian *Sykes-Picot* (Baroud, 2018).

Setelah terlaksananya Balfour, atas persetujuan di bawah pemerintah protektorat Inggris, pada tahun 1930-an Zionis telah melakukan imigrasi Yahudi besar-besaran ke wilayah Palestina hingga menyebabkan mogok massal masyarakat Palestina. Kemudian, atas reaksi ini, protektorat Inggris meminta kepada Amin Huseini untuk menghentikan mogok massal dan telah menjanjikan penyelesaian masalah Palestina jika mogok ini berhasil dihentikan. Setelah selesai permasalahan ini, Inggris mengadakan kongres bersama para delegasi palestina untuk mencari keputusan tentang Palestina. Karena tidak membuat hasil, Inggris menyerahkan permasalahan ini ke komite PBB dan merekomendasikan adanya dua negara dalam satu tanah Palestina yaitu untuk bangsa Arab dan Yahudi. Meskipun AS sempat menolak gagasan tersebut, sidang Majelis PBB telah mengeluarkan Resolusi PBB No 181 yang menegaskan pembagian dua wilayah Palestina yaitu untuk Arab dan Yahudi. Dan tepat pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben Gurion mengumumkan kemerdekaan bagi negara Yahudi Israel dari legitimasi resolusi tersebut (Kumoro, 2009, p. 23).

Dari berdirinya negara Yahudi pada tahun 1948, setelah mandat Inggris berakhir, dimulailah perang Arab-Israel. Zionis telah mengusir penduduk Palestina sebanyak 78 persen dan kurang lebih 750.000 penduduk diusir dan 15.000 korban meninggal dan hanya tersisa 22 persen saja wilayah Palestina yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat. Hingga pada tahun 1949, pertempuran masih berlanjut dan gencatan senjata terus dilakukan antara Israel dan Mesir. Perbatasan secara umum diakui dengan dikenal sebagai Garis Hijau yang menjadi pembatas antara Israel dan Tepi Barat. Garis Hijau ini sebagai perbatasan sebelum Israel menguasai wilayah Palestina selama perang Juni 1967. Peristiwa berdarah pada tahun 1948 yang dialami oleh Palestina juga disebut sebagai Nakba-Day (hari kehancuran) bagi Palestina (Haddad, 2022).

b. Statecraft Fase kedua Two State Solution

Setelah berakhirnya mandat Inggris, Zionisme yang menduduki dan mengambil paksa tanah Palestina membuat bangsa Arab yang mendukung kebebasan Palestina telah mengepung Israel hingga menyebabkan perang besar antara Israel-Arab. Perang besar terjadi setelah hari proklamasi Israel pada 15 Mei 1948 dan berlangsung sampai 7 Januari 1949 (Burdah, 2008, p. 2). Perang ini terjadi atas reaksi bangsa Arab yang

membela Palestina dimana saat itu Zionis telah mengusir dan membunuh penduduk Palestina. Konflik berkepanjangan Israel-Palestina, semakin memanas dengan terbentuknya Hamas yang muncul dan dibentuk pada tahun 1987 oleh Syekh Ahmad Yassin atas perlawanannya terhadap Israel yang telah menduduki jalur Gaza dan Tepi Barat (Hawaleshka, 2023).

Sejarah mencatat telah terjadi perang besar antara Israel-Arab setelah resmi berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Berikut tabel peristiwa perang Arab-Israel

Tabel 1. Peristiwa Perang Arab-Israel 1998-1983

1	Perang besar pertama negara-negara Arab	15 Mei – 7 Januari 1949	Pengepungan bangsa Arab termasuk Mesir, Suriah, Lebanon dan Yordania terhadap Israel yang disebabkan Israel telah menduduki paksa wilayah Palestina
2	Perang Mesir – Israel	29 Oktober – 7 November 1956	Menyangkut sengketa Terusan Suez
3	Six-day war (perang enam hari)	5-10 Juni 1967	Mesir menggalang kekuatan negara-negara Arab untuk melawan Israel
4	Perang Yom Kiffur	6-26 Oktober 1973	Serangan mendadak Anwar Sadat kepada Israel atas kekalahannya pada perang tahun 1967
5	Shabra Shatila (pembantaian berujung perang)	Juni 1982	Invasi Israel menguat di Lebanon. Kelompok Kristen Maronit Lebanon dibawah militer Israel melakukan pengepungan di kamp pengungsitan Palestina

Sumber : Diolah dari Burdah dalam bukunya yang berjudul Konflik Timur

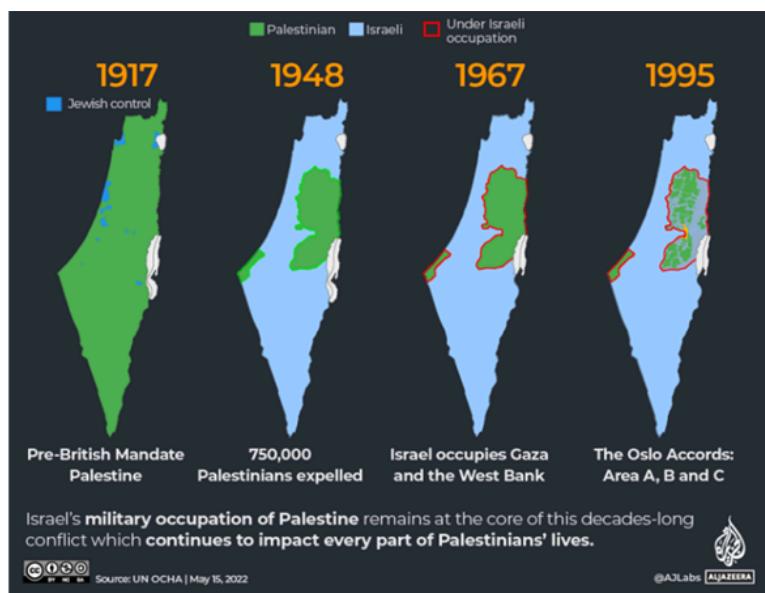
Tengah : Aktor, Isu, dan Dimensi Konflik, halaman 2 s.d 6

Perluasan wilayah Palestina atas pendudukan Yahudi semakin meluas. Pembagian wilayah ke dalam dua negara yaitu Israel dan Palestina dari sebelum Inggris memberikan mandat kemudian terusirnya penduduk Palestina hingga tersisa Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah kependudukan militer Yahudi. Israel semakin melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina. Pencaplokan atas wilayah sengketa mereka gunakan untuk mendirikan pemukiman Yahudi dan stabilitas negaranya. Sehingga hal ini menyebabkan perang besar terjadi antara bangsa Arab-Israel selama beberapa tahun.

Dapat dilihat pada peta di tahun 1995 wilayah Palestina hanya tersisa Jalur Gaza dan Tepi Barat Wilayah Palestina (berwarna hijau) pada tahun 1917 sebelum deklarasi Balfour oleh Inggris hingga tahun 1995 yang semakin meluas wilayah penduduk Yahudi Israel (berwarna biru). Terjadinya perundingan (*negotiable*) yang

diselenggarakan oleh PLO, Israel dan AS untuk jalan damai pada tahun 1993 yaitu Perjanjian Oslo I berharap akan mengakhiri konflik Israel-Palestina namun justru PLO semakin melemah dalam percaturan politik internasional maupun regional. Kemudian perjanjian Oslo II pada tahun 1995 yang ditandatangani oleh PLO, Israel dan AS memberikan peluang bagi PLO untuk memperluas wilayah Gaza dan Jericho ke Tepi Barat (Sihbudi, 2007, p. 212). Berikut *mapping* kehancuran wilayah Palestina sejak sebelum Inggris memberikan mandatnya untuk bangsa Yahudi menduduki tanah Palestina (Haddad, 2022).

Gambar 1. Peta Wilayah Aneksasi Israel



Sumber : Aljazeera (*Nakba-Day : What Happened in Palestine in 1948?*)

Perdamaian yang diharapkan oleh dunia internasional dari perjanjian Oslo hingga Wye River pada tahun 1998 namun juga belum membawa hasil hingga saat ini. Dengan meletusnya intifada Palestina tahun 1987 membawa Timur Tengah seakan terus membara dikarenakan konflik bersenjata yang menghasilkan kekerasan antara Hamas dari Palestina dengan tentara Israel. Serangan kembali diluncurkan oleh Hamas dari jalur Gaza ke penduduk sipil Israel pada 7 Oktober 2023. Namun, dalam serangan yang diluncurkan oleh Hamas tentu tidak terlepas dari dukungan Iran sebagai negara dengan kekuatan nuklir terbesar di Kawasan Timur Tengah. Iran secara aktif telah menjadi peran penting bagi Palestina dalam melawan Israel sejak terjadinya revolusi Iran tahun 1979. Dalam hal ini, Amerika Serikat dan Iran menjadi memanas kembali dikarenakan menurut AS bahwa Iran memfasilitasi Hamas dalam melakukan serangan pada 7 Oktober lalu. AS juga menyebutkan bahwa Iran melakukan hal ini dikarenakan mempertahankan kepentingannya di wilayah Timur Tengah. AS juga memberikan pengetahuan bahwa bombardir yang dilakukan Israel merupakan bentuk bela diri (Aljazeera, 2023).

Perang yang terjadi antara Israel-Palestina telah menimbulkan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya dalam negara Palestina dan Israel itu sendiri tetapi juga

negara-negara yang menunjukkan kepedulian berupa rasa kemanusiaan dan kesamaan ideologi agama. Konflik tersebut sama-sama mendapatkan dukungan dari negara *superpower* sehingga kekerasan yang terjadi antara Palestina (Hamas) dan Israel, (*IDF / Israel Defence Force*) memiliki maksud dibalik perperangan yang terjadi. Serangan Hamas terhadap warga sipil Israel menunjukkan kegigihan Hamas sebagai gerakan perlawanan Islam yang mana ingin menguasai Jalur Gaza yang telah diduduki Israel dan mengobarkan rasa semangat perjuangannya dalam kebebasan rakyat Palestina atas penjajahan Israel selama berpuluhan-puluhan tahun. Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa serangan Hamas adalah atas “*reaksi*” perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina dan aneksasi wilayah Palestina. Demikian, selain ideologi agama yang berbeda, perebutan Yerussalem sebagai tempat suci bagi agama Islam, Yahudi dan Nasrani, histori demografi dalam perperangan ini adalah menjadi inti utama penyebab serangan Hamas terhadap Israel.

Kekerasan Israel dalam merampas hak bangsa Arab terutama Palestina tampaknya tidak berkesudahan hingga sekarang. Kekerasan yang berideologi *Iron Wall* merupakan yang menjadi ruh kekerasan Israel terhadap bangsa Arab dalam melakukan perang besar. Militer Israel sangat keras dan kuat dalam pemusnahan publik secara masif yang disebabkan penculikan Gilad Shalid oleh Militan Hamas pada tahun 2006. Sudah tidak diragukan lagi bahwa kekerasan antara Militan Israel dan Hamas dalam perebutan hak wilayah Palestina (Burdah, 2008, p. 14). Kekerasan yang terjadi juga memberikan *impact* dalam memunculkan pembentukan tatanan baru kedua negara terkhususnya Israel dimana wilayah yang secara hukum internasional milik Palestina namun direbut paksa oleh Israel. Oleh karenanya, Solusi dua negara (*two state solution*) tetap menjadikan konflik dan kegagalan dalam perdamaian bagi Israel-Palestina hingga saat ini.

c. Statecraft Fase ketiga *One Country Two System*

Di Tengah konflik yang terjadi, seruan dari internasional menuju solusi dua negara justru mengalami eskalasi atas serangan Israel terhadap Palestina. Solusi dua negara dalam mencapai perdamaian, tampaknya AS telah menyetujui kebijakan luar negeri-nya yang tentu dalam hal ini tidak terlepas dari lobbi pro Arab dalam menghentikan perperangan yang terus membara di Kawasan Timur Tengah atas konflik Palestina Israel. Solusi dua negara telah disuarakan sejak resolusi yang disampaikan oleh Presiden G.W. Bush serta aktor internasional termasuk Otoritas Palestina (PA), Uni Eropa (UE), Federasi Rusia dan Liga Arab. Hal ini diartikulasikan sebagai “*roadmap*” (peta jalan) bagi perdamaian dua negara (Marrar, 2008, p. 2). Namun solusi tersebut tidak berjalan secara kondusif dan menyebabkan kegagalan menciptakan perdamaian atas dua negara yang berdampingan.

Bergejolaknya konflik Israel-Palestina hingga saat ini memberikan perspektif regional berupa solusi dengan adanya hukum internasional berupa reunifikasi (penyatuan dua negara menjadi satu negara). Reunifikasi yang diajukan dalam hal ini adalah *One Country Two System* yang mempunyai tujuan bersatunya dan diharapkan dapat mengakhiri konflik Israel-Palestina. Dalam kedua fase pembagian wilayah bangsa Yahudi dengan bangsa Arab memunculkan tidak sedikit perlawanan dan kekerasan yang sama-sama mempertahankan atas kedaulatan negaranya. Maka dalam

hal ini, penulis menawarkan Solusi berupa *One Country Two System* yang akan penulis labelkan melalui masalah reunifikasi ROC (Republik of China) dengan Taiwan.

Upaya perdamaian Israel-Palestina telah melewati berbagai fase *negotiable* (meja perundingan) namun dengan meletusnya perang antara Hamas-Israel telah menunjukkan bahwa Two State Solution tidak berdampak apapun bagi keduanya. Usulan mengenai reunifikasi tentu penulis melihat akan adanya negara yang sebelumnya juga menerapkan sistem tersebut. Republik Rakyat Cina yang sebelum adanya masa revolusi terdiri dari banyak negara yang berdaulat sendirinya (negara federasi) seperti Hongkong, Tiongkok dan Taiwan. Berlakunya satu negara dua sistem di Cina berprinsip menyatukan dua ideologi yaitu Tiongkok yang Sosialis sedangkan Hongkong dan Taiwan Kapitalis. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan dengan adanya perbedaan yang menonjol dikarenakan Hongkong dan Taiwan yang non-sosialis. Namun, Peking atau ejaan dari Beijing sebagai pusat keputusan reunifikasi telah mengambil jalan bahwa tujuan *One Country Two System* dirancang untuk menyatukan nasionalis bangsa Cina dan mengakhiri pemisahan nasional yang disebabkan oleh konfrontasi kedua pihak. Hal ini, tentu Peking akan menjamin kehidupan rakyat Taiwan dan Hongkong yang Kapitalis dan tetap tidak akan menghilangkan ideologi satu sama lain (Chao, 1987, pp. 107–124).

Dari reunifikasi Republik Rakyat Cina, maka penulis memberikan penawaran dalam jalan perdamaian bagi Israel-Palestina. Meski tidak menutup kemungkinan bahwa *One Country Two System* menghasilkan pro kontra, namun dalam upaya fase ketiga ini, diharapkan dapat mengakhiri konflik yang terjadi. Hal ini pula, dilihat dari solusi dua negara akan secara permanen memisahkan warga Palestina Israel dari sesama Palestina dan membuat perjuangan mereka untuk kesetaraan murni masalah mengenai internal Israel. Sebaliknya, satu negara yang didirikan berdasarkan prinsip dasar persamaan hak akan mengakhiri diskriminasi formal dan dilembagakan terhadap warga negara Palestina. Dengan begitu, rakyat Palestina akan mendapatkan hak yang sama dan tidak dianggap minoritas dalam internal Israel yang kemudian dalam hal ini, ekonomi tidak memberatkan perbedaan antara keduanya (Faris, 2013, p. 271).

Dengan adanya *One Country Two system* menjadi opini sebagai perwujudan satu negara atas negara Israel dan Palestina. Hal ini yang awal mulanya wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat diakui atas wilayah Palestina pada perjanjian Oslo II pada 1995 maka akan menjadi negara dibawah pimpinan dan stabilitas politik Israel. Dalam memodifikasi hal tersebut, maka dalam penelitian ini sebuah upaya mendefinisikan pembentukan tatanan baru negara dengan seni atau disebut dengan *statecraft*. Adapun bentuk dari *statecraft* yaitu dengan penyatuan atau disebut reunifikasi kedua negara ke dalam satu negara. Dalam proses reunifikasi ini juga perlu melakukan pengaturan yang ulang terhadap tatanan negara. Maka dalam konteks di sini, reunifikasi akan menghasilkan satu kewilayahan di mana tidak adanya wilayah Palestina dan Israel tetapi akan menjadi negara Republik Israel.

Reunifikasi dengan berlakunya hukum internasional *One Country Two System* yakni sebagai upaya menghilangkan hegemoni kelompok Yahudi atas Palestina. Atas dampak ini, maka Israel meresrukturisasi kembali dengan negara Mayoritas Yahudi. Wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza akan dikerahkan ke Israel dan akan menjadi negara yang heterogen berupa perbedaan ideologi, agama, suku atau etnis. Namun hal tersebut bukan lagi menjadi permasalahan dalam membangun sebuah negara. Dalam

kacamata hubungan Internasional, hal ini dapat dilihat dari stabilitas ekonominya antara Israel-Palestina apabila digabungkan menjadi satu negara. Maka prospek *One Country Two System* menjadi alih dalam solusi perdamaian yang mana pada *Two State Solution* tidak menghasilkan negara yang damai, aman dan sejahtera. Karenanya perlu mewujudkan reunifikasi wilayah Palestina dengan Israel sebagai upaya perdamaian dan mengakhiri *violence* (kekerasan) yang terjadi serta dominasi yang telah tertanam antara dua negara tersebut.

Pembentukan reunifikasi negara yang penulis usulkan telah penulis pertimbangkan dari narasi pemerintah elit negara. Dalam pernyataan yang dikutip dari *Al-Jazeera*, Trump menyatakan akan mempelopori pembangunan kembali (*redevelopment*) pemukiman untuk warga Palestina di daerah yang layak untuk ditempati. Hal ini dikarenakan menurutnya, Gaza sudah tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal, meskipun pernyataan itu menurut Hamas akan memunculkan ketegangan terbaru di wilayah tersebut (*Al-Jazeera*, 2025, n.d.). Demikian prospek reunifikasi dengan *One Country Two System* dapat dimunculkan sebagai wacana postmodernisme yang penulis gunakan dalam menganalisis ketegangan konflik saat ini.

Berdasarkan jalan alternatif yang diusulkan, peace proposal ini dapat ditujukan kepada para pemangku kepentingan negara Israel-Palestina, termasuk organisasi atau partai politik dan masyarakat sipil. Lebih khusus lagi penulis menujukan kepada Hamas di Palestina dan partai Likud di Israel. Partai Likud merupakan partai kekuatan terbesar di Israel yang dibangun pada tahun 1973 dan dipimpin oleh Benjamin Netanyahu (*Likud National Liberal Party*, n.d.). Partai dan Gerakan oposisi sangat mempunyai peran besar dalam membawa kondisi negara damai ataupun perang. Oleh karenanya, peace proposal ini dapat ditujukan oleh keduanya dikarenakan jika dari partai oposisi dapat memberikan kelonggaran atas kebijakan yang berpedoman pada hak asasi manusia, kesetaraan sosial, dan menjunjung tinggi perdamaian, maka hal ini dapat memunculkan prospek *One Country Two System*. Namun, perlu diketahui bahwa reunifikasi ini ditawarkan sebagai jalan alternatif atas bekerjanya teori dalam wacana modernitas dikarenakan perlu banyak pertimbangan termasuk kelemahan untuk mewujudkannya.

KESIMPULAN

Konflik berkepanjangan Israel-Palestina kembali memanas setelah serangan Hamas terhadap Israel yang diluncurkan pada 7 Oktober 2023. Hal tersebut tidak hanya melibatkan kedua negara namun juga memicu perdebatan hingga keterlibatan luar negara dalam menghadapi pergolakan wacana yang terjadi. Dari permasalahan tersebut, penulis menganalisis berdasarkan teori Postmodernisme yang mempunyai relasi antara kekuasaan (*power*) dengan pengetahuan (*knowledge*). Sehingga dapat diketahui bahwa dibalik serangan yang diluncurkan Hamas tidak terlepas dari keterlibatan kekuatan politik Iran. Dengan menggunakan perspektif genealogi dimana penulis menguraikan sejarah runut fase-fase yang diambil dalam upaya perdamaian Israel- Palestina. Alur sejarah awal mula terjadinya yaitu dari fase protektorat Inggris hingga solusi dua negara.

Demikian dalam penelitian ini berkesimpulan, dari bergejolaknya kembali konflik Israel-Palestina, penulis menawarkan adanya *statecraft* fase ketiga yaitu *One*

Country Two System bagi Israel Palestina. Tatanan baru ini berawal dari pembentukan satu negara atau reunifikasi kedua negara menjadi satu. Karenanya perlu mengulang tatanan negara yang baru dan reunifikasi ini atau disebut juga dengan “*Statecraft*” yaitu seni dalam membentuk satu negara yang awalnya dua negara dengan pembaruan nama yaitu “*Republik Israel*”. Namun perlu diketahui bahwa reunifikasi ditawarkan dalam bentuk bekerjanya teori di tengah wacana modernitas di abad modern ini, dikarenakan prospek ini dapat memberikan nilai-nilai modernitas seperti hak asasi manusia, kesetaraan sosial, dan diplomasi perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazeera, 2025. (n.d.). Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2025/2/5/trump-says-us-will-take-over-and-own-gaza-in-redevelopment-plan>
- Aljazeera, 2023. (n.d.). Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/palestinian-group-hamas-launches-surprise-attack-on-israel-what-to-know>
- Aljazeera. (2023, October). Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/24/us-says-iran-actively-facilitating-attacks-on-bases-in-middle-east>
- Baroud, R. (2018). *How Britain Destroyed the Palestinian Homeland*. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/features/2018/4/10/how-britain-destroyed-the-palestinian-homeland>
- BBC News. (2023, October). BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72vzkw3qp70>
- Bishara, M. (2023, September). *Oslo is dead, long live the peace process*. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/opinions/2023/9/12/oslo-is-dead-long-live-the-peace-process>
- Burchill, S., & Linklater, A. (2019). *Theories of International Relations* (M. Sobirin (Trans.); kedua). Nusa Media.
- Burdah, I. (2008). *Konflik Timur Tengah ; Aktor, Isu, dan Dimensi Konflik* . Tiara Wacana.
- Chao, C.-M. (1987). “One Country, Two Systems”: A Theoretical Analysis. In *Asian Affairs: An American Review* (Vol. 14, Issue 2).
- Faris, H. (2013). *Hani Faris - The Failure of the Two-State Solution_ The Prospects of One State in the Israel-Palestine Conflict (Library of Modern Middle East Studies)-Bloomsbury Publishing (2013)*.
- Haddad, M. (2022, May). *Nakba Day: What happened in Palestine in 1948?* Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/15/nakba-mapping-palestinian-villages-destroyed-by-israel-in-1948>
- Hawaleshka, D. (2023, October). *History Illustrated: The story of Hamas and its fight for Palestine*. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/gallery/2023/10/11/history-illustrated-the-story-of-hamas-and-its-fight-for-palestine>
- Indriana, N. (2017). *PEMETAAN KONFLIK DI TIMUR TENGAH (Tinjauan Geografi Politik)* (Vol. 1, Issue 1).
- Kumoro, B. (2009). *Hamas : Ikon Perlawanan Islam terhadap Zionisme Israel* .

Mizan Pustaka.

- Likud National Liberal Party.* (n.d.). [Www.Likud.Org.Il.](http://www.likud.org.il/) <https://www.likud.org.il/>
- M. Sachar, H. (2006). *Howard M. Sachar - A History of the Jews in the Modern World (2006, Vintage)* - libgen.li.
- Marrar, K. (2008). *Khalil Marrar - The Arab Lobby and US Foreign Policy (Routledge Research in American Politics)* (2008).
- Nurjannah, E. P., & Fakhruddin, M. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. In *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* (Vol. 1, Issue 1).
- Sihbudi, R. (1995). *Profil Negara-negara Timur Tengah.* PT Dunia Pustaka Jaya.
- Sihbudi, R. (2007). *Menyandera Timur Tengah* (R. Sihbudi (Ed.); First). PT Publika Mizan.
- Stepansky, J., & Najjar, F. (2023, October). *Israel-Hamas war updates: Israeli ground forces expanding Gaza operations.* Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2023/10/27/israel-hamas-war-live-israel-bombs-gaza-overnight-more-than-7000-dead>
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2012). *International Relations Theory (5th Edition)* Paul R. Viotti Mark V. Kauppi. 335.